



Sitasi artikel ini (APA 6th Edition style):

Muhajir, A. (2018). Langkah Politik Belanda di Aceh Timur: Memahami Sisi Lain Sejarah Perang Aceh, 1873-1912. *MUKADIMAH*, 1(2), 160-171.

Langkah Politik Belanda di Aceh Timur: Memahami Sisi Lain Sejarah Perang Aceh, 1873-1912

Ahmad Muhajir

Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP – Universitas Islam Sumatera Utara

ahmadkiddy@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai langkah politik kolonialis Belanda di Aceh Timur dalam konteks memahami sisi lain sejarah Perang Aceh (1873-1912). Aceh Timur merupakan daerah di mana perang berakhir lebih cepat dibandingkan daerah lainnya di seluruh Aceh. Selain itu juga merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang sangat menggiurkan bagi Belanda kala itu. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan memanfaatkan banyak literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Artikel ini juga menawarkan sebuah penjelasan sejarah alternatif tentang sisi lain dari Perang Aceh yang telah terjadi hampir satu setengah abad yang lalu dengan memposisikan Aceh Timur sebagai latar panggung utamanya. Penjelasan sejarah yang disajikan mencakup kondisi di wilayah Aceh Timur di tengah situasi Perang Aceh; langkah-langkah politik yang diterapkan Belanda untuk menaklukkan negeri-negeri di Aceh Timur; dan kebijakan-kebijakan Belanda membangun dan menata wilayah Aceh Timur setelah perang berakhir sehingga menjadi daerah potensial untuk ekspansi industri dari Sumatera Timur.

Kata kunci: Langkah politik Belanda, Aceh Timur, sejarah Perang Aceh.

PENDAHULUAN

Aceh sejak zaman dahulu dikenal sebagai negeri “Serambi Makkah” karena tradisi keislaman yang kuat. Selain menjadi agama resmi Kesultanan Aceh, Islam juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Aceh. Adat dan Islam merupakan pedoman yang membentuk karakter orang Aceh seperti yang terdapat dalam pepatah lama “*Hukôm ngön adat han jeut cré, lagèë dzat ngön sifeut*” (hukum [Islam] dan adat tidak dapat dipisahkan, seperti Zat Tuhan dengan sifat-Nya). Catatan para penjelajah bangsa asing seperti Marco Polo, Tome Pires, dan Ibn Battuta membenarkan adanya ikatan yang kuat antara adat dengan Islam yang dianut oleh masyarakat di Aceh. Pedoman tersebut pula yang mengantarkan Kesultanan Aceh mampu menjadi kerajaan Islam terbesar dan termasyhur di Nusantara serta mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah tahta Sultan Iskandar Muda.

Aceh begitu disegani oleh bangsa-bangsa Eropa yang ingin menguasai Nusantara. Upaya menancapkan tujuan kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa dilakukan dengan berbagai cara dan kebanyakan selalu berhasil terutama untuk menguasai jalur perdagangan penting, kecuali di wilayah pengaruh Kesultanan Aceh. Portugis sempat menguasai jalur perdagangan Selat Malaka pada tahun 1511. Tak lama kemudian terusir oleh aliansi Kesultanan Aceh dan Kesultanan Demak. Inggris bersikap lebih bersahabat dengan Aceh karena kepentingan perdagangan adalah segalanya. Namun tidak begitu dengan Belanda yang kerap mendapat sorotan tajam dan kecaman bangsa Aceh, baik persoalan perdagangan maupun diplomatik dengan pihak kesultanan.

Nama besar Aceh mulai pudar setelah memasuki abad ke-18. Kesultanan dilanda konflik internal dan menyusutnya kontrol terhadap wilayah vassal. Pasca kesepakatan Tratat London 1824 antara Inggris dan Belanda terkait penguasaan wilayah koloni di Hindia. Belanda lebih leluasa menganeksasi negeri-negeri merdeka di Sumatera. Hingga paruh kedua abad ke-19 tinggal satu lagi wilayah Nusantara yang belum dapat ditaklukkan oleh mereka: Aceh. Sementara Inggris lebih memilih Semenanjung Malaya dan Singapura di mana pengaruh Aceh sudah hilang, namun tetap menjaga hubungan diplomatik dengan kesultanan, bahkan lepas tangan apabila Belanda terang-terangan mengusik Aceh. Belanda berpikir keras untuk menaklukkan Aceh di mana mereka harus menghadapi dua kekuatan sekaligus: pasukan kesultanan dan pengikut agama Muhammad yang fanatik. Demikian pemahaman mereka kala itu sebelum Islamolog Christian Snouck Hurgronje memberi tahu banyak hal tentang karakter orang Aceh kepada pemerintah kolonial. Selain itu juga Belanda cukup belajar dari pengalaman pemberontakan yang berbau Islam, seperti ketika menghadapi kaum Paderi di Sumatera Barat dan Pangeran Diponegoro di Jawa.

Perang Aceh (1873-1912) yang berlangsung ±40 tahun diwarnai oleh rangkaian pertumpahan darah, ketegangan sosial, pergolakan rakyat, kekacauan sosial-ekonomi yang berkepanjangan hingga perubahan tatanan sosial-politik di seluruh Aceh. Hal tersebut merupakan akibat yang timbul dari sebuah tragedi kemanusiaan terbesar seumur bangsa Belanda menguasai Nusantara. Kisah-kisah tentang Perang Aceh dalam tradisi historiografi Indonesia lazimnya cenderung menyajikan narasi *mainstream*. Sejarah Perang Aceh baru dikupas secara ilmiah dan lebih humanis sejak ditulis oleh Teuku Ibrahim Alfian dalam karyanya *Perang di Jalan Allah* (Alfian, 1987). Untuk itu perlu memahami sejarah Perang Aceh dari banyak sisi, berbagai perspektif, dengan pendekatan keilmuan. Diharapkan tradisi historiografi Indonesia posmodern tidak lagi menawarkan penjelasan sejarah seputar persoalan peristiwa-peristiwa heroik dan pertumpahan darah yang sudah tuntas ditulis oleh sejarawan terdahulu, melainkan yang menawarkan narasi alternatif dengan penjelasan yang lebih segar dari sisi lain atau tempat lain yang belum terungkap dari kisah-kisah sekitar empat dekade huru-hara kala itu.

Penulis Belanda H.C. Zentgraaff pernah berkata bahwa "...orang-orang Aceh, baik pria maupun wanita pada umumnya telah berjuang dengan gigih

sekali untuk sesuatu yang mereka pandang sebagai kepentingan nasional (negara) atau agama mereka” (Alfian, 1987, p. 278). Anthony Reid menaksir jumlah korban Perang Aceh di pihak orang Aceh mencapai 1/3 dari total populasi kala itu, sedangkan dari pihak kolonialis Belanda sekitar 13.412 serdadu tewas (Alfian, 1987). Sementara ilustrasi tersebut tidak cukup menentukan dan mewakili kondisi yang sebenarnya terjadi di berbagai daerah. Apalagi negeri-negeri di Aceh pada dasarnya adalah negeri otonom di bawah kepemimpinan *ulèëbalang*, walaupun tunduk secara federatif kepada sultan. Artinya penguasa sebenarnya atas negeri-negeri kecil di Aceh beserta wilayah dan rakyatnya adalah para *ulèëbalang*. Hubungan struktural politik seperti itu sangat memungkinkan loyalitas terhadap sultan bersifat fleksibel dan oportunistik.

Salah satu daerah yang dapat diketahui berlangsung situasi yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Aceh adalah di bagian timur. Negeri-negeri di sana lebih cepat takluk kepada Belanda antara tahun 1874-1877 dan perang lebih dahulu berakhir hanya dalam tempo tiga tahun. Wilayah yang kemudian dinamai *Oostkust van Atjeh* (Pantai Timur Aceh atau Aceh Timur) oleh pemerintah kolonial Belanda itu segera dipersiapkan sebagai wilayah investasi bagi ekspansi industri perkebunan dan pertambangan minyak bumi sejak dekade terakhir abad ke-19 (Muhajir, 2016). Sedangkan di bagian Aceh lainnya seperti di Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Barat dan Aceh Tengah perang rakyat melawan kolonialis Belanda masih berkecamuk dan baru akan berakhir hampir dua dekade kemudian (1912). Artinya wilayah Aceh Timur merupakan satu-satunya wilayah yang paling kondusif di seluruh Aceh, walaupun bukan berarti tanpa pertumpahan darah sama sekali. Lantas seperti apa kondisi di wilayah Aceh Timur di tengah situasi Perang Aceh? Bagaimana pula langkah-langkah politik yang diterapkan Belanda untuk menaklukkan negeri-negeri di sana? Bagaimana Belanda membangun dan menata wilayah Aceh Timur setelah perang berakhir sehingga menjadi daerah potensial untuk ekspansi industri dari Sumatera Timur? Artikel ini diharapkan mampu menawarkan sebuah penjelasan sejarah alternatif tentang sisi lain dari Perang Aceh yang berlangsung hampir satu setengah abad yang lalu dengan memosisikan Aceh Timur sebagai *setting* panggung utamanya.

METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Pada tahap heuristik data-data yang dikumpulkan berupa hasil dari penelitian kepustakaan dan telaah arsip. Kemudian dilanjutkan pada tahap verifikasi dengan melakukan kritik sumber. Sumber-sumber yang digunakan selanjutnya diinterpretasikan menjadi sebuah penafsiran sejarah yang didukung oleh fakta dan data yang kredibel. Pada tahap terakhir data sejarah tersebut disintesis dan ditulis dalam bentuk historiografi dalam konteks ini berupa artikel tentang deskripsi sejarah yang eksplanatif. Adapun fokus penelitian ini adalah memahami sisi lain situasi Perang Aceh dengan menempatkan wilayah Aceh Timur sebagai arena utama atau lingkup spasial, sedangkan lingkup temporal mencakup periode (1873-1912).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manuver Politik Belanda dalam Ekspedisi Militer di Aceh

Secara umum, elite kolonialis telah melakukan sejumlah manuver politik dan ekonomi demi menancapkan hegemoni, dominasi, dan kedaulatan Hindia Belanda di Aceh. Contohnya setelah kegagalan ekspedisi militer pertama (1873) yang menewaskan Jenderal J.H.R. Kohler, maka pada ekspedisi militer kedua (1874) pimpinan J. van Swieten secara khusus diproyeksikan untuk menundukkan negeri-negeri di luar Aceh Besar melalui tiga jalur, yaitu: diplomasi, blokade, dan agresi militer. Jalur diplomasi ditempuh dengan mengirim utusan yang membawa maklumat pengakuan kedaulatan Hindia Belanda kepada kepala-kepala negeri Bumiputra, yaitu para *ulèëbalang*. Maklumat itu dikenal sebagai "Maklumat Van Swieten" yang mulai disebar sejak tahun 1874. Sementara itu, blokade dilakukan dengan cara menyiagakan sejumlah armada kapal perang oleh pihak kolonial di titik-titik penting perairan Selat Malaka. Tujuannya adalah untuk menghadang armada kapal perang Aceh dan menyabotase perekonomian orang Aceh terutama di pantai timur, yang sangat bergantung pada lalu-lintas ekspor-impor di kawasan selat. Agresi militer sebagai langkah terakhir dilakukan untuk menuntaskan upaya diplomasi dan blokade yang tidak maksimal.

Strategi diplomasi, blokade dan agresi militer yang dijalankan oleh pihak kolonialis Belanda secara *de facto* sukses untuk menaklukkan seluruh negeri di Aceh Timur dalam tempo tiga tahun saja (1874-1877). Dokumen *Verklaring* yang berisi pengakuan kedaulatan Belanda ditandatangani oleh *ulèëbalang* di seluruh negeri diproses secara *de jure* melalui persetujuan dari gubernur jenderal untuk disahkan sebagai bagian dari wilayah administratif Hindia Belanda.

Secara umum Maklumat Van Swieten yang disampaikan kepada negeri-negeri di Aceh Timur direspons secara beragam oleh para *ulèëbalang*. Dari banyak negeri merdeka di sana, hanya sedikit yang menolak dengan terang-terangan maklumat tersebut. Sebagian besar para *ulèëbalang* memilih untuk menerima maklumat agar tidak diperangi dan sadar terhadap kekuatan militer Belanda. Terlebih lagi, selama perang kolonial dengan Belanda negeri-negeri di Aceh cenderung berjuang sendiri-sendiri, bahkan saling bermusuhan dengan negeri lain (Ismail, 1991). Lemahnya solidaritas dalam menghadapi kekuatan Belanda mengakibatkan negeri-negeri di Aceh Timur mudah sekali ditaklukkan tanpa harus lebih sering mengangkat senjata.

Salah satu negeri yang menolak Maklumat Van Swieten kala itu adalah Negeri Langsa, negeri yang nantinya menjadi daerah ibukota Aceh Timur. Maklumat disampaikan pada bulan Juli 1874 dengan tegas ditolak oleh Teuku Chik Keujuën Banang. Pada bulan April 1875, dia mangkat dan digantikan oleh putranya, Teuku Chik Bentara Blang. Situasi transisi dimanfaatkan oleh kolonialis Belanda untuk mengubah pendirian *ulèëbalang* yang baru itu supaya lebih kooperatif, namun tidak berhasil (Ismail, 1991).

Pada tanggal 3 Mei 1877, pasukan militer Hindia Belanda di Aceh Besar bertolak dari Pelabuhan Ulëë Lheuë dan tiba di perairan Langsa pada tanggal 6 Mei. Tujuannya adalah untuk menindaklanjuti sikap Negeri Langsa secara serius yang berarti: penaklukan melalui militer. Pantai di Teluk Langsa diblokade, akibatnya aktivitas perniagaan (terutama komoditas lada) ke Pulau Pinang terhambat. Tidak ditemukan laporan kontak senjata dan korban jiwa akibat kedatangan ekspedisi militer itu. Tampaknya Negeri Langsa tidak siap menyusun pertahanan dan kekuatan militer dalam negeri juga tidak begitu berarti untuk mengadakan perlawanan terbuka. Tanpa perlawanan yang berarti, kolonialis Belanda sekali lagi memberi ultimatum kepada *ulëëbalang* untuk mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas negerinya. Kokohnya resistensi *Ulëëbalang* Langsa dari tekanan politik dan blokade pantai akhirnya patah setelah menghadapi tekanan militer Belanda yang kini di depan mata. Langsa pun mengakui kedaulatan Hindia Belanda pada tanggal 12 Mei 1877. Setelah melalui perundingan dengan para pemimpin di daerahnya, maka pada tanggal 12 Mei, dia akhirnya mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Mei 1877, Teuku Chik Bentara Blang melakukan sumpah kepada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dia berikrar lagi pada tahun 1891 yang tertuang dalam 18 pasal *Verklaring*, diperpanjang melalui sebuah *Additioneele Verklaring* pada 7 Mei 1897 dan diperbarui melalui *Korte Verklaring* pada tanggal 23 Januari 1900. Langsa merupakan salah satu dari sedikit negeri di Aceh Timur yang terakhir takluk kepada Belanda (Muhajir, 2016).

Setelah situasi di Aceh Timur menjadi paling kondusif daripada daerah lain, maka pemerintahan kolonial segera diselenggarakan. Aceh Timur menjadi daerah pertama yang terbebas dari huru-hara perang selama ±25 tahun. Pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa baru di Aceh tidak menghapus sistem atau struktur kekuasaan patrimonial asli. Bagi mereka, kepentingan yang utama adalah menegakkan hegemoni melalui perbaikan ekonomi dan kedaulatan politik, sedangkan kepentingan-kepentingan di luar itu cenderung diabaikan.

Menaklukkan Negeri, Menata Pemerintahan

Pemerintah Hindia Belanda menganut dualisme dalam sistem administrasi pemerintahan, yaitu wilayah yang diperintah langsung dan wilayah yang diperintah tidak langsung. Sistem pemerintahan tidak langsung menunjukkan sifat pragmatis penguasa kolonial, yaitu demi kepentingan ekonomi-politiknya. Dengan sistem tersebut, mereka bisa mengeksploitasi struktur kekuasaan tradisional, bahkan cenderung memperkuatnya. Di samping itu, pemerintahan tidak langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial memberi peluang besar kepada penguasa Bumiputra untuk tetap menjalankan pemerintahannya berdasarkan otoritas tradisional, sedangkan pada sisi lain, pemerintah kolonial juga menerapkan pemerintahan yang legal rasional sebagai sistem birokrasi modern. Sistem dualistik seperti itu mengakibatkan baik pada pemerintahan Belanda maupun pada pemerintahan Bumiputra harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan politiknya. Pihak pemerintah secara berangsur-angsur memutuskan struktur

hubungan-hubungan politik yang tradisional. Transformasi dari pola kekuasaan yang tradisional ke pola kekuasaan yang legal rasional dilaksanakan selangkah demi selangkah (Munawiah, 2002).

Dalam praktiknya, model pemerintahan yang dibentuk oleh Belanda di Aceh dibagi menjadi dua jenis, yaitu Birokrasi Kolonial dan Birokrasi Bumiputera.

1) Birokrasi Kolonial

Sejak dibentuk pada tahun 1878 (Staatsblad, 1878 No. 30), *Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden* (Gubernemen Aceh dan daerah takluknya) telah mengalami lima kali perubahan struktural, baik karena *reorganisatie* (penyesuaian bentuk dan susunan administratif) maupun *bestuurheervorming* (pemekaran daerah) seiring dengan bertambahnya daerah taklukan. Perubahan-perubahan tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 1884 (Staatsblad, 1884 No. 205), kedua kali pada tahun 1899 (Staatsblad, 1899 No. 259), ketiga kali pada tahun 1908 (Staatsblad, 1908 No. 401), keempat kali pada tahun 1914 (Staatsblad, 1914 No. 87), dan kelima kalinya pada tahun 1922 (Staatsblad, 1922 No. 451).

Reorganisasi pada tahun 1908, menetapkan wilayah administratif Gubernemen Aceh dan daerah takluknya dibagi atas lima *afdeelingen* (setingkat distrik), yaitu: (1) *Groot-Atjeh* (Aceh Besar); (2) *Noordkust van Atjeh* (Aceh Utara); (3) *Oostkust van Atjeh* (Aceh Timur); (4) *Westkust van Atjeh* (Aceh Barat); dan (5) Babel. Reorganisasi pada tahun 1914, *Afdeeling* Babel diubah menjadi *Afdeeling Alaslanden* (Tanah Alas). Reorganisasi pada tahun 1922, menambah satu lagi *afdeeling* baru, yaitu Pidië sebagai wilayah pemekaran dari Aceh Utara. *Afdeeling* Aceh Timur pada tahun 1908 meliputi empat *onderafdeeling* (setingkat subdistrik), yaitu: Idi, Langsa, Tamiang, dan Serböjadi (Staatsblad, 1908 No. 401; Staatsblad, 1914 No. 87). Pada tahun 1922 hanya tersisa tiga *onderafdeeling* saja, karena Serböjadi dan Gayö Lués telah digabung ke Tanah Alas dalam satu *afdeeling* pemekaran yang baru, yaitu *Gajö en Alaslanden* (Gayö dan Tanah Alas) (Staatsblad, 1922 No. 451).

Pada tahun 1922, *Afdeeling* Aceh Timur, berada di bawah seorang asisten residen yang berkedudukan di Langsa. Terdiri atas tiga *onderafdeeling* yang meliputi sejumlah *landschap* (negeri swapraja), yaitu: (a) Idi, yang terdiri dari *landschap*: Tanjung Seumantok dan Meureubô, Simpang Ulim, Julök Cut, Julök Rayeuk, Bugéng dan Bagok, Idi Cut, Idi Rayeuk, Peudawa Rayeuk, di bawah seorang *controleur* atau kontrolir (pejabat pemerintahan sipil dan *Departement van Binnenlandsch Bestuur*) yang berkedudukan di Idi; (b) Langsa, yang terdiri dari *landschap*: Peureulak, Sungai Raya, dan Langsa, di bawah seorang asisten residen sebagai kepala *afdeeling* dan dibantu oleh seorang *gezaghebber* (pejabat dari kalangan militer setingkat kontrolir) yang berkedudukan di Langsa; (3) Tamiang, yang terdiri dari *landschap*: Karang, Bendahara, Sungai Iyu, dan daerah dari Kejuruan Muda sampai Sutan Muda, di bawah seorang *controleur* yang berkedudukan di Kualasimpang (Staatsblad, 1922 No. 451).

Semua pejabat pemerintah kolonial, baik gubernur, asisten residen hingga para inspektur (*controleur* maupun *gezaghebber*) berasal dari pamong praja bangsa Belanda, kecuali *zelfbestuurder* dan para pejabat bawahannya dari kalangan Bumiputra, yaitu dari kalangan *ulèëbalang* secara genealogis. Kutaraja ditetapkan sebagai ibukota Gubernemen Aceh dan daerah takluknya. Di sana berkedudukan gubernur sipil dan militer selama periode 1874-1918 dan gubernur sipil selama periode 1918-1936. Pada tahun 1936, Gubernemen Aceh diubah statusnya menjadi sebuah keresidenan dalam pemerintahan gabungan Gubernemen Sumatera yang bertahan hingga akhir era kolonial Belanda dan awal era pendudukan Jepang.

2) Birokrasi Bumiputera

Bagi pemerintah kolonial, struktur kekuasaan tradisional yang diikutsertakan dalam struktur birokrasi Hindia Belanda dinilai sangat menguntungkan, khususnya dalam usaha mengukuhkan otoritasnya terhadap rakyat. Hal itu digambarkan oleh Sutherland sebagai berikut:

“...terdapat keyakinan umum di kalangan penguasa-penguasa kolonial, bahwa penghormatan rakyat kepada pejabat-pejabat pribumi yang menjamin keselamatan kehadiran Belanda di Jawa (maupun di Aceh), paling tidak dipertahankan dengan menjaga agar korps (birokrasi) itu tetap tradisional (Sutherland, 1983, p. 250).”

Dilandasi oleh loyalitas golongan priyayi di Jawa dan golongan *ulèëbalang* di Aceh kepada pemerintah kolonial, serta keyakinan bahwa rakyat setia kepada para penguasa tradisional, maka dipastikan rakyat juga akan setia kepada pemerintah kolonial. Secara umum pemerintah telah mengadopsi sistem dan struktur birokrasi tradisional dan operasionalisasinya dengan menciptakan birokrasi Bumiputra dengan bentuk *indirect rule* (pemerintahan tidak langsung) dalam struktur pemerintahan kolonial yang resmi (Munawiah, 2002).

Birokrasi Bumiputra di Aceh juga mengenal dualisme, yaitu wilayah yang diperintah langsung dan wilayah yang diperintah tidak langsung. Wilayah yang diperintah langsung meliputi wilayah *Lhèë Sagoë* (Tiga Sagi) di *Afdeeling* Aceh Besar, empat wilayah di *Onderafdeeling* Singkil, dan di *Afdeeling* Pidië (kecuali *Onderafdeeling* Sigli, Lam Meulo dan Padang Tiji). Menurut pemerintah kolonial, wilayah Tiga Sagi dahulunya diperintah langsung oleh Sultan Aceh. Setelah perang berakhir, Belanda-lah yang memerintah langsung daerah itu (Sunny, 1980). Sementara itu, wilayah yang tidak diperintah langsung meliputi seluruh daerah di Aceh selain Tiga Sagi, Singkil, dan Pidië. Wilayah tersebut merupakan *onderafdeeling* otonom atau *landschap* (negeri swapraja) yang dikepalai oleh *zelfbestuurder*. Di antaranya *Onderafdeeling* Sigli, Lam Meulö dan Padang Tiji, Meureudu, Bireuën, Lhökseumawè, Lhöksukôn, Idi, Langsa, Tamiang, Calang, Meulabôh, Tapaktuan, Singkil, Simeluë, Takengön, Serböjadi, Gayö Lués, dan Tanah Alas. Walaupun diberi otonomi yang luas, namun pemerintah Hindia Belanda tetap mengawasi jalannya pemerintahan (Kreemer, 1923).

Di bawah pemerintahan tingkat *landschap*, terdapat unit paling kecil dalam pemerintahan Bumiputra, yaitu *gampöng* (desa) yang dikepalai oleh

seorang *geuchik* atau *keuchik* (setingkat kepala desa) dan dibantu oleh *teungku meunasah* (penghulu). Di antara posisi *zelfbestuurder* atau *ulèëbalang* dan *geuchik*, terdapat sebuah badan yang membantu keduanya, yaitu *tuha peuët* dan *tuha lapan*. *Tuha peuët* dan *tuha lapan* adalah badan adat yang terdiri dari orang-orang tua kampung yang disegani karena pengalamannya, budi bahasanya dan kepahamannya akan adat-istiadat. Biasanya jumlah mereka empat orang dan delapan orang (Alfian, 1987; Vleer, 1935). Selain itu, terdapat badan federasi yang menaungi beberapa *gampöng*, yang dikenal dengan istilah *mukim*. Masing-masing *mukim* mewakili federasi dari minimal delapan *gampöng*. Federasi *mukim* dipimpin oleh seorang *imeum* atau imam dan seorang *kadli* atau penghulu (Munawiah, 2002).

Membangun Kembali Aceh melalui Politik Pasifikasi dan Politik Etis

Menjelang abad ke-20, politik kolonial meninggalkan prinsip liberalisme yang dianggap sudah usang dan beralih ke prinsip-prinsip Etis. Sementara itu tokoh-tokoh pendukung ekonomi kapitalisme yang sangat liberal telah menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan (Ricklefs, 2011). Upaya Pasifikasi (mengamankan) Aceh merupakan yang paling alot dan melelahkan sepanjang sejarah Belanda menguasai Aceh. Perang di Aceh membuktikan bahwa penaklukan suatu daerah tidak semata-mata bisa dicapai melalui kebijakan represif. Meskipun aksi militer mampu menekan intensitas perlawanan dan mempercepat konsolidasi politik, namun rekayasa sosial adalah solusi tepat yang membuka peluang penaklukan Aceh menjadi lebih besar. Snouck Hurgronje memiliki kontribusi besar di dalamnya yang mengenal orang Aceh secara agama maupun kultural. Pengetahuannya mengenai orang Aceh diteruskan menjadi advis kepada pemerintah kolonial yang sebelumnya begitu “buta” terhadap informasi mengenai karakter orang Aceh yang sulit ditaklukkan.

Pemerintah Hindia Belanda beberapa kali mengubah kebijakan untuk mengamankan Aceh, karena hingga abad ke-20 Aceh belum berhasil ditaklukkan sepenuhnya. Pemerintah mencoba melaksanakan suatu kebijakan baru yang disebut sebagai “*Atjeh-politiek*”, yaitu sebuah pendekatan yang menunjukkan sikap lunak kepada masyarakat Aceh sesuai anjuran Hurgronje. Tindakan-tindakan yang mengandalkan kekerasan dan kekuatan militer ditinggalkan demi upaya-upaya damai dan kooperatif yang diharapkan akan menimbulkan simpati, meredam kebencian, dan menyuburkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kolonial. Untuk itulah Pasifikasi melalui pendekatan-pendekatan baru dilaksanakan secara intensif ketika memasuki abad ke-20 sekaligus sebagai pembuka jalan bagi penerapan Politik Etis di Aceh (Ismail, 1991). Upaya untuk mengamankan Aceh secara garis besar terdiri dari beberapa segmen.

Pertama, penaklukan Aceh dicapai secara berangsur-angsur selama periode 40 tahun Perang Aceh. Alfian membagi Perang Aceh menjadi tiga tahap, yaitu: Tahap pertama, perang antara dua negara (Kesultanan Aceh dan Belanda); Tahap kedua, perang antara para *ulèëbalang* dengan Belanda; Tahap ketiga, perang antara rakyat dengan Belanda. Dua tahap perang paling awal

berlangsung sangat singkat, hanya beberapa tahun saja. Akan tetapi, perang pada tahap ketiga adalah yang paling lama, pada tahap itu perang dipandang sakral dalam pandangan agama Islam dan dipersuci dengan ideologi *jihad fi sabilillah* yang dipimpin oleh para ulama kharismatik (Alfian, 1987). Meskipun ibukota kesultanan berhasil direbut dalam waktu singkat (1874), namun perang yang dihadapi oleh Belanda tidaklah semudah seperti yang dikira. Jatuhnya kekuasaan sultan ke tangan Belanda tidak berarti bahwa seluruh wilayah Aceh telah ditaklukkan. Sebagian kecil gerilyawan Aceh mampu bertahan hingga beberapa dasawarsa. Basis legitimasi Kesultanan Aceh sebagai sebuah negara berasal dari federasi raja-raja otonom, yaitu para *ulèëbalang* yang mengepalai negeri-negeri merdeka di seluruh Aceh. Namun secara formal tunduk di bawah kedaulatan sultan. Oleh karena itu, Belanda berupaya mendapatkan loyalitas dan pengakuan kedaulatan dari para *ulèëbalang* .

Kedua, elite tradisional Aceh terdiri dari tiga golongan, yaitu: sultan, *ulèëbalang* , dan ulama. Setelah kesultanan direbut, posisi sultan dilenyapkan, yang menandai bahwa Aceh sebagai suatu negara merdeka telah tiada. Di samping itu, posisi *ulèëbalang* justru dipertahankan oleh pemerintah kolonial sebagai satu-satunya elite Bumiputra yang legal. Posisi ulama yang populis dan agamais diberi ruang bergerak yang luas, kecuali mereka yang memimpin kelompok militan (Amin, 1988). Memelihara *ulèëbalang* sebagai elite dan pejabat resmi Bumiputra dipandang memberi banyak keuntungan bagi Belanda, seperti halnya terhadap pejabat bupati di Jawa. Para *ulèëbalang* yang telah tunduk kemudian diangkat sebagai *zelfbestuurder* yang diberi gaji tetap dan berbagai keistimewaan lainnya, sehingga citra mereka di mata rakyat sangat menjadi eksklusif dan prestisius (Amin, 1988).

Ketiga, penciptaan situasi keamanan dan politik yang kondusif-kooperatif diwujudkan melalui *Atjeh-politiek* (politik khas Aceh) sebagai solusi tepat untuk memecahkan *Atjeh-probleem* (masalah Aceh) yang sangat rumit. Selain itu juga untuk menciptakan situasi yang mendukung pembangunan pascaperang. Pemerintah serius merawat hubungan yang berbasis pada kolaborasi dengan para *ulèëbalang* dan ulama yang lebih moderat, karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan rakyat Bumiputra. Selain itu, pemerintah juga menghapus beban kerja wajib bagi penduduk serta peningkatan fungsi kepolisian dan pengadilan modern.

Keempat, pembangunan prasarana fisik di Aceh dimulai setelah Belanda sukses mengamankan Kutaraja. Pembangunan di pantai timur sangat diutamakan karena memiliki potensi ekonomi lebih banyak. Jaringan trem, pelabuhan laut, dan jalan darat merupakan alat untuk memuluskan Pasifikasi Aceh. Pembangunan jaringan *Atjeh-trem* (Trem Aceh) dimulai sejak tahun 1874 pada jalur Ulèë Lheuë - Kutaraja. Setelah melewati lima dasawarsa dan ratusan proyek-proyek pembangunan rel dan jembatan yang sangat melelahkan, akhirnya jalur Trem Aceh telah mencapai kota Kualasimpang pada tahun 1912, yang terhubung dengan jaringan *Deli Spoorweg Maatschappij* (Maskapai Kereta Api Deli) di Besitang beberapa tahun setelahnya. Pembangunan pelabuhan-

pelabuhan laut yang baru dipandang sangat vital oleh pemerintah kolonial. Pelabuhan-pelabuhan tradisional yang telah eksis pada era kesultanan dipertahankan dan diteruskan pembangunannya hingga layak digunakan untuk mendukung aktivitas pelayaran dan perniagaan kawasan Selat Malaka. Pelabuhan Lhokseumawè, Idi, Peureulak, dan Langsa merupakan yang paling penting di pantai timur Aceh, karena industri di sektor perkebunan dan pertambangan berada di sana. Pemerintah juga membangun jaringan jalan negara dan jalan lainnya di seluruh Aceh, termasuk jalan-jalan patroli dan jalan yang menghubungkan daerah-daerah di pedalaman dengan perkotaan.

Kelima, salah satu cara untuk mereduksi sikap anti-Belanda adalah melalui perbaikan perekonomian yang hancur akibat perang, di antaranya: penyediaan tanah untuk pengembangan pertanian rakyat; peningkatan usaha pertanian rakyat seperti padi, lada, pinang dan kelapa; pembangunan irigasi; penyuluhan pertanian modern, pengenalan bibit-bibit unggul; pendirian bank-bank kecil yang menyediakan kredit lunak untuk modal usaha pertanian rakyat; membuka pintu seluas-luasnya kepada pihak swasta di sektor industri di Aceh Timur; serta penciptaan lapangan kerja yang luas bagi penduduk (Ismail, 1991; Langhout, 1923).

Keenam, kebijakan Pasifikasi diutamakan juga untuk menyentuh segmen pendidikan rakyat Bumiputra yang telah digagas dalam Politik Etis. Salah satunya melalui pembangunan *Volkschool* (Sekolah Desa) oleh pemerintah kolonial sejak tahun 1907. Pada awalnya, pendidikan Barat hanya bisa diterima oleh sebagian kalangan *ulèëbalang* saja, tetapi belum bisa langsung diterima oleh kalangan ulama dan rakyat. Sejak tahun 1901, putra-putra *ulèëbalang* banyak yang dikirim ke sekolah-sekolah terbaik di Kutaraja dan Bukittinggi. Selain itu, organisasi Muhammadiyah dan Taman Siswa dilibatkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pendidikan Bumiputra. Pemerintah berusaha keras untuk mengganti pendidikan tradisional dengan sistem sekolah modern. Bukan hanya sebagai cara untuk mencetak pegawai-pegawai yang terpelajar, melainkan juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Pasifikasi Aceh.

Ketujuh, perbaikan kualitas kesehatan rakyat tidak begitu menonjol dibandingkan fokus pemerintah terhadap pembangunan perekonomian dan prasarana fisik. Akan tetapi, pemerintah tetap melaksanakan pembangunan berbagai rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa. Di samping itu, dinas lain juga ikut membantu penyediaan sarana air bersih untuk masyarakat umum. Program-program penyuluhan kesehatan dan vaksinasi juga tidak luput dari perhatian pemerintah.

Pemerintah kolonial menganggap jika perekonomian maju, maka kehidupan rakyat akan menjadi lebih baik dan lebih makmur, sehingga ketentraman dan ketertiban akan lebih terjamin. Dengan demikian, diharapkan rakyat Aceh menyerah secara definitif kepada Belanda dan melupakan penderitaan yang dialami akibat perang. Meskipun Pasifikasi dianggap berhasil, fakta sejarah justru membuktikan bahwa Belanda tidak pernah mengalami masa damai yang sesungguhnya di Aceh hingga kekuasaan mereka berakhir.

PENUTUP

Langkah politik Belanda di Aceh Timur pada periode awal Perang Aceh terbilang berjalan efektif dan sukses. Setelah kegagalan ekspedisi pertama ketika menyerang langsung pusat kekuatan kesultanan di Kutaraja, maka pada ekspedisi militer kedua (1874) pimpinan J. van Swieten secara khusus diproyeksikan untuk menundukkan negeri-negeri di luar Aceh Besar melalui tiga jalur, yaitu: diplomasi, blokade, dan agresi militer. Militer kolonial mulai menggerogoti kantong-kantong kekuatan Aceh. Uniknya dengan strategi itu Belanda berhasil menundukkan negeri-negeri merdeka di Aceh Timur hanya dalam tempo tiga tahun. Belanda diuntungkan dengan banyaknya kelemahan di pihak Aceh, di antaranya adalah lemahnya pertahanan militer dan sikap yang kurang solid antar sesama negeri. Bagi pada *ulèëbalang* di Aceh Timur, mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas negerinya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Kuatnya tekanan dari pihak kolonial tidak mampu ditahan lagi oleh negeri-negeri yang cenderung berjuang sendiri-sendiri. Episode perang di Aceh Timur sekitar 150 tahun yang lalu ternyata tidak lebih tragis dan pelik seperti yang terjadi di wilayah lain, seperti di Aceh Besar dan Aceh Tengah yang menyumbang korban jiwa paling banyak. Selain faktor kondusivitas didukung pula dengan faktor letaknya yang bersebelahan dengan Sumatera Timur mengakibatkan pemerintah kolonial sesegara mungkin mempersiapkan wilayah Aceh Timur sebagai daerah baru untuk ekspansi industri perkebunan dan pertambangan minyak bumi pada akhir abad ke-19. Langsa sebagai salah satu kota yang berhasil tumbuh menjadi kota modern berkat industri perkebunan yang membesarkannya. Kepentingan industri di Aceh Timur dipusatkan di Langsa sebagai ibukota.

Model pemerintahan dualistik diterapkan di *Afdeeling* Aceh Timur. Selain membentuk pemerintahan dengan birokrasi khas kolonial, pemerintah kolonial juga memelihara *ulèëbalang* sebagai pemimpin pemerintahan dengan birokrasi Bumiputera. Politik Pasifikasi dan Etis juga menyertai langkah-langkah politik Belanda. Selain memodifikasi struktur kepemimpinan lokal, Belanda juga mampu menekan potensi perlawanan rakyat atas nama jihad melalui perbaikan kesejahteraan dan pembangunan. Hal ini merupakan cara pemerintah kolonial dalam mengontrol daerah jajahan yang dengan susah payah berhasil mereka rebut selama empat dekade. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan Belanda menguasai Aceh Timur, adanya pengembangan industri, terbangunnya infrastruktur, sangat membantu memperbesar peluang untuk menaklukkan daerah lain di Aceh. Aceh Timur merupakan sisi lain dari rangkaian kisah perang kolonial di Aceh yang melegenda sekaligus perang terlama sepanjang sejarah kolonialisme dan imperialisme Belanda di Nusantara.

REFERENSI

Arsip dan Terbitan Berkala

Staatsblad van Nederlandsch-Indië op het jaar: 1878 No. 30; 1884 No. 205; 1899 No. 259; 1908 No. 401; 1914 No. 87; 1922 No. 451.

Buku, Tesis, Artikel, dan Prosiding

- Alfian, T. I. (1987). *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Amin, M. M. (1988). *Kelompok Elite dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Grafika Kita.
- Ismail, M. G. (1991). *Seuneubok Lada, Uleebalang dan Kumpeni: Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840-1942*. Universiteit Leiden.
- Kreemer, J. (1923). *Atjeh: Algemeen Samenvattend Overzicht van Land en Volk van Atjeh en Onderhoorigheden* (2nd ed.). Leiden: E.J. Brill.
- Langhout, J. (1923). *Economische Staatskunde in Atjeh*. Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon.
- Muhajir, A. (2016). *Industrialisasi di Kota Langsa pada Era Kolonial: Dari Kapitalisme Negara ke Swasta, 1907-1942*. Universitas Diponegoro.
- Munawiah. (2002). *Birokrasi Kolonial di Aceh, 1903-1942*. Universitas Gadjah Mada.
- Ricklefs, M. C. (2011). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suny, I. (1980). *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bathara Karya Aksara.
- Sutherland, H. (1983). *Terbentuknya sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Vleer, A. J. (1935). *De Positie van den Toeha Peuët in het Atjehsche Staatsbestel*. In *Koloniale Studiën*. G. Kolff & Co.,.